

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Pengadaan Proyek

1.1.1 Lokasi Penempatan

Jakarta Barat merupakan salah satu dari lima wilayah administratif Jakarta yang terletak di bagian barat Daerah Khusus Ibukota. Kecamatan Kembangan berfungsi sebagai pusat divisi wilayah, yang menjadi fokus layanan pemerintahan dan administrasi. Didirikan pada tahun 1966, Jakarta Barat resmi berdiri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1978. Namun, tidak memiliki dewan legislatif sendiri. Seorang Walikota dipilih sebagai Bupati Jakarta Barat oleh Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta, setelah melalui pertimbangan dewan daerah. (Wikipedia, 2007)

Walikota Jakarta Barat diangkat oleh Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan memperhatikan pertimbangan dewan. Jakarta Barat secara administratif terbagi menjadi 8 kecamatan dan 56 kelurahan. Pada tahun 2018, jumlah penduduk Jakarta Barat berjumlah 2.486.074 jiwa, dimana terdapat 850 warga negara asing (WNA) dari berbagai negara. Sekitar pertengahan tahun 2023, jumlah penduduk Jakarta Barat diperkirakan mencapai 2.615.945 jiwa.



Gambar 1. 1 Peta Jakarta

<https://broonet.com/peta-jakarta/>

Sumber: Broonet

(Diunduh pada tanggal 20 September 2023)

1.1.2 Data Penyanggah Kesejahteraan Sosial

Masalah tunawisma di Jakarta Barat merupakan masalah yang cukup besar, sekitar 28.360 orang tercatat sebagai tunawisma (*Encyclopedia of Homelessness Vol 1.Sage, 2004*)

Tabel 1. 1 Data Jumlah Penyanggah Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Jenis PMKS	Jumlah Penyanggah Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)		
	Jakarta Barat		
	2019	2020	2021
Gelandangan	390	332	559
Pengemis	14	29	97

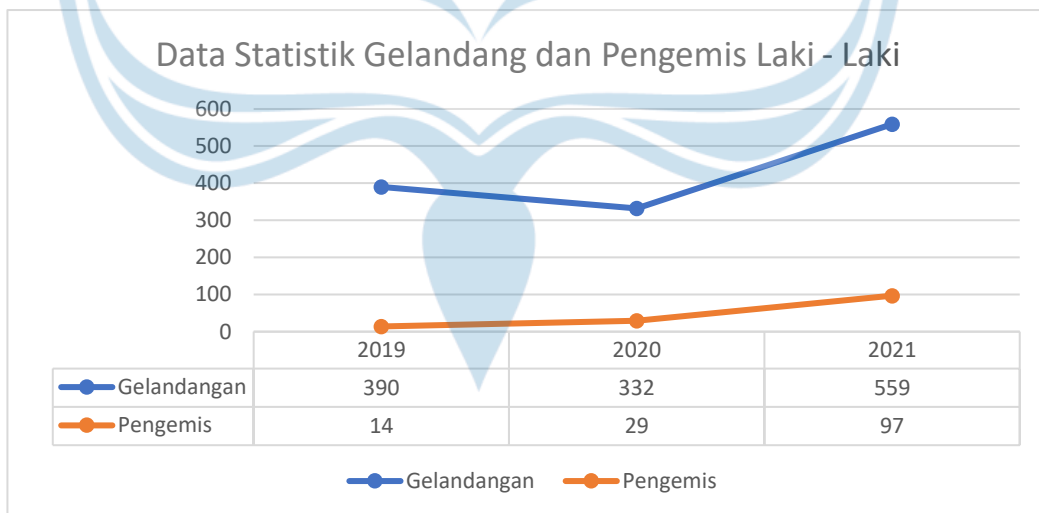
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta

Tabel 1. 2 Data Jenis Kelamin Penegemis dan Geladangan

tanggal	jenis_p...	jenis_ke...	jumlah	tanggal	jenis_p...	jenis_ke...	jumlah
2020-01-...	PENGEMI...	Laki-Laki		2020-01-...	GELAND...	Laki-Laki	
2020-01-...	PENGEMI...	Laki-Laki	1	2020-01-...	GELAND...	Laki-Laki	
2020-01-...	PENGEMI...	Laki-Laki		2020-01-...	GELAND...	Laki-Laki	
2020-01-...	PENGEMI...	Laki-Laki		2020-01-...	GELAND...	Laki-Laki	
2020-01-...	PENGEMI...	Laki-Laki	3	2020-01-...	GELAND...	Laki-Laki	
2020-01-...	PENGEMI...	Laki-Laki		2020-01-...	GELAND...	Laki-Laki	
2020-01-...	PENGEMI...	Laki-Laki		2020-01-...	GELAND...	Laki-Laki	2
2020-01-...	PENGEMI...	Laki-Laki		2020-01-...	GELAND...	Laki-Laki	1
2020-01-...	PENGEMI...	Laki-Laki		2020-01-...	GELAND...	Laki-Laki	
2020-01-...	PENGEMI...	Laki-Laki	2	2020-01-...	GELAND...	Laki-Laki	2
2020-01-...	PENGEMI...	Laki-Laki		2020-01-...	GELAND...	Laki-Laki	1
2020-01-...	PENGEMI...	Laki-Laki		2020-01-...	GELAND...	Laki-Laki	
2020-01-...	PENGEMI...	Laki-Laki		2020-01-...	GELAND...	Laki-Laki	3

Sumber: Jakarta Open Data

Menurut informasi Jakarta Open Data, mayoritas jenis kelamin gelandangan dan pengemis adalah laki-laki. Namun data tersebut bukanlah data yang akurat ,karena pengemis dan gelandangan diantaranya tidak memiliki (KTP) Kartu Tanda Kewarganegaraan (Jakarta Open Data, 2021).



Gambar 1. 2 Data Statistik Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

<https://jakarta.bps.go.id/indicator/27/615/1/jumlah-penyandang-masalah-kesejahteraan-sosial-pmks-menurut-jenis-dan-kabupaten-kota-administrasi-.html>

Sumber: Analisis Penulis

1.1.3 Penjelasan Mengenai Tunawisma

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), tunawisma adalah seseorang yang tak memiliki hunian (rumah). Tunawisma mengacu pada kondisi seseorang yang tidak memiliki tempat tinggal yang teratur, aman dan layak untuk ditinggali. Kondisi ini dapat disebabkan oleh kehilangan pekerjaan, menghadapi perceraian atau perpisahan, menderita penyakit mental atau fisik, atau menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Tunawisma adalah masalah yang sering dikaitkan dengan penyalahgunaan narkoba, kurangnya pendidikan, kesempatan kerja dan kurangnya kebijakan perumahan yang tepat. (*National Alliance to End Homelessness, 2005*)

Tunawisma dapat menimbulkan dampak negatif yang signifikan terhadap kesehatan fisik dan mental, kesejahteraan sosial, dan stabilitas ekonomi. Mereka mungkin mengalami kekerasan, pelecehan, dan diskriminasi, serta kesulitan memenuhi kebutuhan dasar mereka seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Tantangan-tantangan ini dapat mempersulit mereka dalam mencari dan mempertahankan pekerjaan, mengakses layanan kesehatan dan keamanan.



Gambar 1.3 Kondisi Pengemis

<https://newsroom.unsw.edu.au/news/social-affairs>

Oleh Nadia Razzhigaeva, UNSW Sydney

(Diunduh pada tanggal 20 September 2023)

Akar penyebab tunawisma sangatlah kompleks dan memiliki banyak aspek, namun beberapa penyebab umum yang terjadi adalah kemiskinan, kurangnya perumahan yang terjangkau dan terbatasnya akses terhadap pendidikan dan kesempatan kerja. Diperlukan pendekatan yang tepat untuk mengatasi penyebab mendasar dari tunawisma dan memberikan layanan dukungan kepada mereka yang membutuhkan. Hal ini dapat mencakup penyediaan perumahan yang terjangkau, perawatan kesehatan mental dan fisik, pelatihan kerja dan program penempatan, serta sumber daya lainnya untuk membantu individu menjadi mandiri dan aman.

1.2 Latar Belakang Permasalahan

Tempat penampungan tunawisma berarti fasilitas yang menyediakan tempat penampungan sementara dengan akomodasi tidur bagi para tunawisma dan tidak mengharuskan penghuninya untuk menandatangani perjanjian sewa atau hunian. Ada berbagai jenis tempat penampungan tunawisma salah satunya tempat penampungan laki-laki. Tempat penampungan ini menyediakan layanan dan dukungan khusus untuk memenuhi kebutuhan populasi tunawisma (*State of Iowa, 2014*).

Ketika krisis tunawisma meningkat, kebutuhan akan tempat penampungan yang lebih banyak dan lebih baik menjadi jelas. Pada tahun 1980an, tempat penampungan tunawisma pertama dengan layanan khusus didirikan. Seiring berjalannya waktu, layanan yang diberikan oleh tempat penampungan tunawisma telah berkembang hingga mencakup akses terhadap makanan, pakaian, perawatan medis, layanan kesehatan mental, pengobatan penyalahgunaan zat, dan pelatihan kerja. (Michelle Chen, 2019).

Tempat penampungan tunawisma juga memainkan peran penting dalam mengatasi akar penyebab tunawisma, seperti kemiskinan, pengangguran, dan kurangnya perumahan yang terjangkau. Tujuan dari tempat penampungan tunawisma adalah untuk membantu individu keluar dari faktor-faktor yang menyebabkan krisis rumah tinggal dan menuju perumahan permanen.

Oleh karena itu, kebutuhan akan tempat penampungan tunawisma untuk para tunawisma yang berpotensi menjadi sebuah misi yang penting dan memerlukan tindakan kolaborasi untuk mengatasinya secara efektif.

1.2.1 Krisis Tempat Penampungan Tunawisma

Krisis tempat penampungan tunawisma di Kota Jakarta Barat merupakan permasalahan sosial dan politik yang telah mempengaruhi kota ini selama bertahun-tahun. Beberapa faktor berpengaruh terhadap krisis ini, seperti terbatasnya pasokan perumahan yang terjangkau, kurangnya layanan dukungan yang memadai bagi populasi tunawisma dan meningkatnya biaya hidup.

Tempat penampungan tunawisma saat ini sangatlah minim dan kurang memadai. Diantaranya terdapat tempat yang seharusnya menjadi bangunan olahraga yaitu Gelanggang Olah Raga (GOR) Tanah Abang menjadi tempat penampungan tunawisma sementara. GOR di Tanah Abang dijadikan tempat penampungan tunawisma sementara merupakan arahan dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk menampung tunawisma yang terkena Covid-19 di tahun 2020. Namun saat ini kasus Covid-19 sudah mereda ,sehingga tempat penampungan tunawisma di GOR Tanah Abang sudah tidak dibuka. Para tunawisma yang sudah tidak bisa menggunakan GOR Tanah Abang sebagai tempat hunin akhirnya dikembalikan di wilayah mereka masing-masing. Banyak tunawisma yang balik menjadi gelandangan dikarenakan tidak memiliki hunian, dan juga tidak memiliki keluarga lagi. (CNBC Indonesia ,2020)



Gambar 1. 4 Kondisi GOR Tanah Abang

Sumber: <https://news.detik.com/berita/d-5324842/kondisi-gor-tanah-abang-yang-jadi-tempat-penampungan-sementara-tunawisma>

(Diunduh pada tanggal 20 September 2023)

Salah satu penyebab utama krisis ini adalah kurangnya solusi perumahan yang tepat bagi individu. Keterjangkauan perumahan telah menjadi tantangan besar bagi banyak rumah tangga berpendapatan rendah. Hal ini menyebabkan peningkatan jumlah orang yang hidup di jalanan dan di tempat penampungan sementara, yang seringkali penuh sesak, kekurangan dana, dan kekurangan fasilitas dasar seperti air bersih dan listrik.

Tantangan signifikan lainnya adalah kurangnya layanan dukungan yang memadai bagi populasi tunawisma. Banyak individu tunawisma menghadapi permasalahan seperti penyakit mental, penyalahgunaan obat-obatan terlarang, dan kemiskinan, yang memerlukan dukungan dan layanan yang tepat. Namun, layanan dukungan ini seringkali tidak memadai atau bahkan tidak ada sama sekali, yang seharusnya berkontribusi terhadap terjadinya krisis.

Secara keseluruhan, krisis penampungan tunawisma di kota Jakarta Barat merupakan permasalahan kompleks dan memiliki banyak aspek yang memerlukan tindakan secara bersamaan (Kolektif) dan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat untuk mengatasinya secara efektif. Hal ini termasuk menyediakan tempat tinggal sementara, menyediakan layanan dukungan yang

memadai dan mengatasi akar penyebab tunawisma, seperti masalah kesehatan mental, penyalahgunaan narkoba, dan kemiskinan.

1.2.2 Minimnya Fasilitas Penampungan Tunawisma

Minimnya fasilitas Latihan di tempat penampungan tunawisma merupakan permasalahan umum yang seringkali dikaitkan dengan sejumlah tantangan diantaranya adalah:

- a. Keterbatasan Ruang: Tempat penampungan tunawisma sering kali berlokasi di daerah perkotaan dimana harga properti mahal dan ruang terbatas. Hal ini mungkin menyulitkan dalam mencari ruang untuk fasilitas tempat latihan atau tempat konsultasi kesehatan.



Gambar 1. 5 Kondisi Ruang Penampungan Tunawisma

Sumber: <https://megapolitan.kompas.com/read/2020/04/27/15483641/tak-punya-keluarga-di-jakarta-3-tunawisma-belum-boleh-tinggalkan-gor>
(Diunduh pada tanggal 20 September 2023)

- b. Biaya: Fasilitas latihan memerlukan investasi finansial yang besar, termasuk biaya peralatan, personel tenaga kerja dan pemeliharaan. Bagi banyak tempat penampungan tunawisma, terbatasnya dana yang tersedia membuat tidak mungkin untuk membayar biaya tambahan untuk latihan terpadu dan konseling kesehatan.



Gambar 1. 6 Homeless Shelter Funding

Sumber: https://www.realclearpolicy.com/articles/2022/10/14/a_nyc-funded_homeless_shelter_wasted_24m_858637.html
(Diunduh pada tanggal 20 September 2023)

- c. Penempatan Staf: Tempat penampungan tunawisma seringkali mengalami kesulitan dalam merekrut dan mempertahankan staf, sehingga sulit untuk menemukan staf yang diperlukan untuk mendukung dan mengelola fasilitas latihan terpadu. Hal ini dapat mengakibatkan fasilitas kekurangan staf, kurang dimanfaatkan, atau bahkan ditutup.
- d. Keterampilan Pengguna: Beberapa individu tunawisma mungkin tidak memiliki keterampilan atau pengetahuan untuk mengikuti fasilitas latihan terpadu dengan aman atau efektif, sementara yang lain mungkin memiliki masalah perilaku atau fisik yang membatasi kemampuan mereka untuk berpartisipasi. Hal ini dapat menyebabkan berkurangnya penggunaan fasilitas, sehingga kurang efektif dari segi biaya.

Oleh karena itu, meskipun kurangnya fasilitas latihan terpadu di tempat penampungan tunawisma merupakan masalah yang signifikan, terdapat sejumlah tantangan dan hambatan yang perlu diatasi agar dapat mengatasinya secara efektif.

Salah satu cara untuk menutupi keterbatasan lahan yaitu menggunakan program *Mini Compact Living*. *Mini compact living* adalah gaya hidup di mana seseorang tinggal di ruangan kecil yang mungkin sekecil apartemen studio atau sebesar rumah kecil. Mereka yang mempraktikkan kehidupan *mini compact* sering melakukannya karena berbagai alasan, termasuk masalah lingkungan, pertimbangan keuangan, dan preferensi pribadi. *Mini compact living* sering kali melibatkan penggunaan ruang dengan sangat efisien, menggabungkan furnitur multifungsi dan solusi penyimpanan, serta memanfaatkan setiap inci ruang secara maksimal. (Femina Group, 2015)

1.2.3 Fasilitas Latihan Terpadu

Fasilitas pelatihan penting bagi tempat penampungan tunawisma karena memberikan keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan penghuni untuk berintegrasi ke dalam masyarakat, mencari pekerjaan, dan menciptakan masa depan yang lebih baik bagi diri mereka sendiri.

Dengan menyediakan fasilitas pelatihan, tempat penampungan tunawisma dapat memberikan kesempatan kepada penghuninya untuk mempelajari keterampilan baru dan mendapatkan pekerjaan tetap yang dapat meningkatkan harga diri mereka serta pengalaman untuk meningkatkan potensi penghasilan dan mengurangi ketergantungan mereka pada bantuan.

Salah satu fasilitas pelatihan yang sangat berpotensi adalah pelatihan *Digital Marketing* karena saat ini, dengan pesatnya perkembangan teknologi, fasilitas pelatihan pasar online menjadi semakin penting bagi orang-orang yang ingin memajukan karir mereka atau mengubah jalur profesional mereka.



Gambar 1. 7 Digital Marketing

Sumber: <https://greatnusa.com/artikel/digital-marketing-adalah/>

(Diunduh pada tanggal 20 September 2023)

Sumber: Great Nusa

Manfaat fasilitas pelatihan yang dapat diakses melalui platform online sangat beragam. Pertama pelatihan ini menawarkan lingkungan belajar yang fleksibel dan nyaman bagi semua kalangan usia, fasilitas pelatihan ini juga menyediakan berbagai macam materi dan konten kursus yang dapat diakses dari lokasi manapun dengan online.

1.2.4 Kriteria Penampungan Tunawisma

Kriteria untuk menerima individu berusia minimal 18 tahun dan maksimal 30 tahun sebagai penghuni tempat penampungan tunawisma didasarkan pada usia dan mempertimbangkan faktor-faktor seperti tingkat kemandirian, kemampuan untuk bekerja dan akses terhadap layanan khusus remaja. Hal ini dapat mencakup bukti usia, seperti akta kelahiran atau tanda pengenal yang dikeluarkan pemerintah, serta penilaian kesehatan fisik dan mental, penggunaan narkoba, dan faktor risiko lainnya. Kriteria ini dirancang untuk menjamin keselamatan dan kesejahteraan penduduk, dan untuk menyediakan sumber daya dan dukungan yang mereka perlukan untuk bertransisi keluar dari tunawisma.

Tempat penampungan tunawisma akan beroperasi dengan bantuan pemerintah daerah dan organisasi layanan sosial lainnya karena mereka menyediakan layanan publik yang penting bagi populasi rentan, dan dapat memperoleh manfaat dari pendanaan pemerintah, dukungan kebijakan, dan sumber daya lainnya. Keterlibatan pemerintah dalam pembangunan tempat penampungan tunawisma sering kali penting untuk memastikan bahwa tempat tersebut memenuhi persyaratan keselamatan, keberlanjutan, aksesibilitas, dan untuk memfasilitasi respons terkoordinasi terhadap tunawisma di masyarakat.

1.2.5 Pendekatan Kontekstual

"Kontekstual" mendefinisikan situasi di mana suatu objek tidak dapat ditempatkan di suatu lokal tanpa memperhatikan item yang telah berada di pengaturan yang sama sebelumnya. (Wolford, 2014). "Kontekstual" pada dasarnya berarti hubungan antar unsur. Arsitektur kontekstual secara khusus menyiratkan keselarasan antara bangunan dan lingkungannya, baik alami maupun buatan. Unsur kontekstual arsitektur meliputi segi fisik dan ciri simbolik karena manusia selalu terhubung dengan materi, baik konkrit maupun abstrak (spiritual, konseptual dan lain-lain).

Arsitektur kontekstual dibagi menjadi dua kategori - kontras dan harmoni. Strategi desain kontras sangat penting untuk menekankan dan menonjolkan suatu lokasi di sebuah kota, namun jika diterapkan secara tidak tepat atau tidak tepat, dapat menimbulkan kekacauan dan mengakibatkan kerusakan. Sebaliknya,

keharmonisan, yang berpusat pada pemeliharaan keharmonisan dalam lingkungan yang sudah ada, sangat penting untuk menjaga lingkungan yang sudah ada. Dalam hal bangunan baru, tata letaknya mempertimbangkan dan menghormati konteks/lingkungan sekitar kawasan tersebut, sekaligus berkolaborasi dengan bangunan atau lanskap yang sudah ada, sehingga melestarikan “tradisi” yang telah ada sejak lama. (Alhamdani, 2010).

1.3 Rumusan Masalah

Bagaimana wujud rancangan *Homeless Shelter* yang inklusif bagi tunawisma berpotensi (Umur 19-28), dengan hunian *Mini Compact Living*, serta menyediakan sebuah fasilitas publik berupa ruang terbuka, dengan pendekatan kontekstual?

1.4 Tujuan dan Sasaran

1.4.1 Tujuan

Tujuan rancangan *Homeless Shelter* yaitu menciptakan sebuah rancangan yang inklusif dengan hunian *Mini Compact Living* dengan menyediakan ruang terbuka publik, dengan pendekatan kontekstual.

1.4.2 Sasaran

Berikut sasaran dari perancangan *Homeless Shelter*:

- a. Melakukan studi preseden terhadap *Homeless Shelter* untuk memahami tata ruang dan kebutuhan ruang yang diperlukan.
- b. Merancang konsep *Homeless Shelter* yang inklusif dengan fasilitas pelatihan terpadu dan konseling kesehatan.
- c. Merancang tata massa, tata ruang dan tata rupa yang memberi pengguna sebuah gambaran untuk hunian tempat tinggal sementara yang dilengkapi fasilitas pelatihan terpadu dengan pendekatan kontekstual.

1.5 Lingkup Studi

1.5.1 Materi Studi

1.5.1.1 Lingkup Spasial

Ruang lingkup spasial Homeless Shelter di Kota Jakarta mencakup aspek perencanaan massa, perencanaan ruang dan penampilan, dengan pendekatan perilaku sebagai aspek fokus perancangan.

1.5.1.2 Lingkup Substansial

Batasan lingkup substansial yang menjadi aspek fokus perancangan adalah tata massa bangunan, zoning ruang, serta penerapan arsitektural dalam perencanaan visual dengan perilaku para tunawisma menjadi pertimbangan utama dalam menentukan kualitas dan kuantitas rancangan.

1.5.1.3 Lingkup Temporal

Perencanaan dan perancangan Homeless Shelter di Kota Jakarta diharapkan dapat menjadi penyelesaian dalam kurun waktu minimal 20 tahun.

1.5.2 Pendekatan Studi

Pendekatan studi pada *Homeless Shelter* di Kota Jakarta menggunakan pendekatan kontekstual. Pendekatan ini diterapkan dengan kemampuan untuk membentuk variabel dan mudah beradaptasi terhadap perubahan dalam kehidupan pengguna dalam sebuah tata massa maupun tata ruang.

1.6 Metode Studi

1.6.1 Pola Prosedural

Pola procedural yang digunakan dalam perencanaan dan perancangan *Homeless Shelter* di Kota Jakarta Barat sebagai berikut:

1.6.1.1 Pengumpulan Data

Tabel 4.1 Data dan Metode Analisis

NO	DATA	METODE ANALISIS
1.	UU dan Peraturan Pemerintah	Metode kuantitatif dan kualitatif dicari dokumen peraturan.
2.	BPS	Metode kuantitatif untuk mencari informasi biaya penduduk dan upah minimum regional.
3.	Dokumen - dokumen	Metode kualitatif untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang.

Sumber: Analisis Penulis

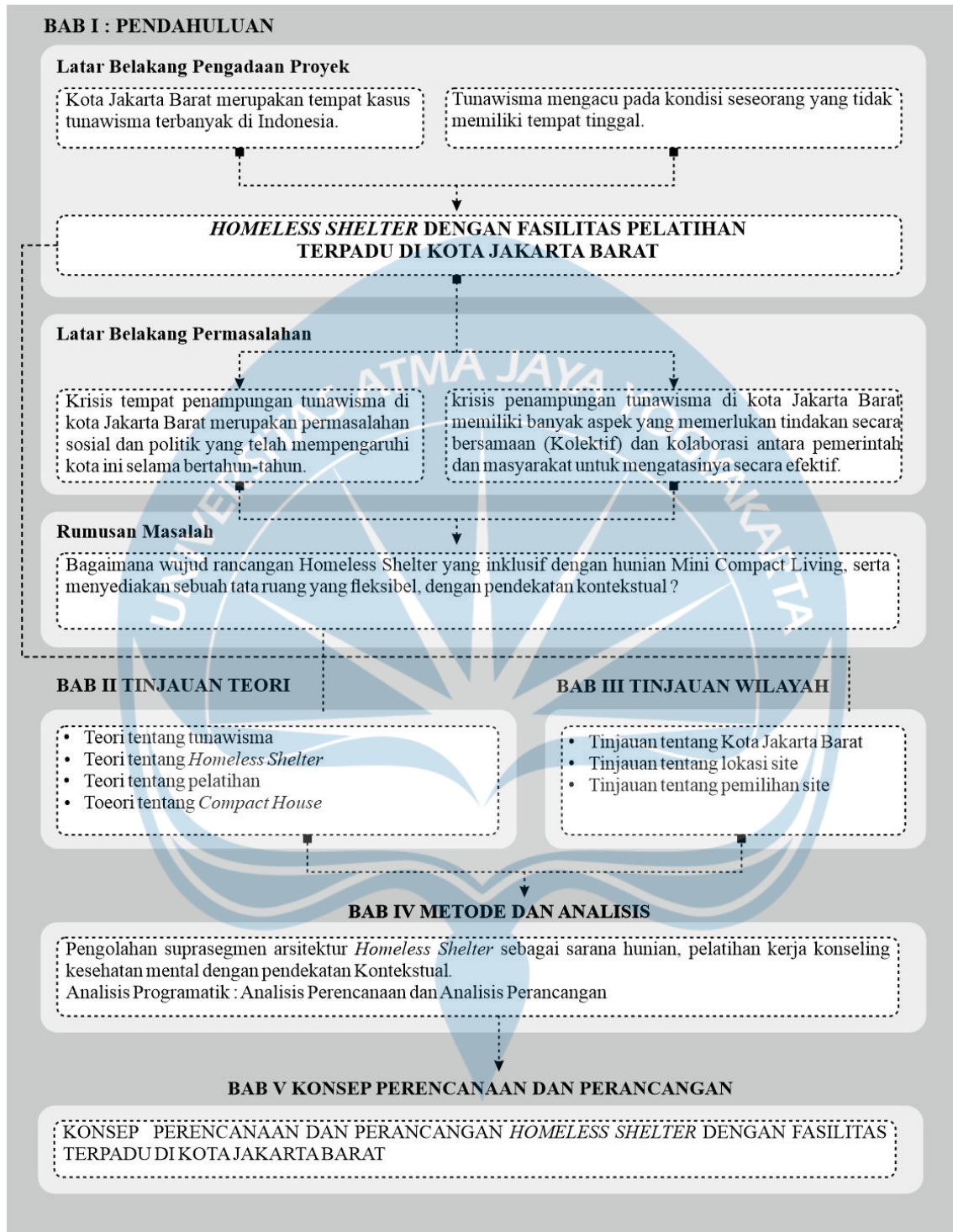
Proses pengumpulan data menggunakan metode deduktif dan induktif, dimana aspek deduktif diambil dari studi literatur untuk memastikan urgensi penelitian dan memilih tunawisma yang berpotensi sebagai landasan perencanaan dan perancangan. Sebaliknya, elemen induktif dicapai melalui observasi lokasi dan kawasan, serta wawancara dengan tunawisma untuk menilai urgensi penelitian dan memperoleh kesimpulan untuk memandu proses pengambilan keputusan dalam merancang tempat penampungan tunawisma di Kota Jakarta.

1.6.1.2 Analisis

Menganalisa permasalahan pada esensi proyek, mengidentifikasi potensi berdasarkan data yang diperoleh, merespon titik utama permasalahan dan mengembangkan potensi yang ada.



1.7 Tata Langkah



Gambar 1. 8 Gambar Tata Langkah

Sumber: Analisis Pelaku

1.8 Sistematika Penulisan

BAB I : Pendahuluan

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang pengadaan proyek, latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan dan sasaran, lingkup studi, metode studi dan sistematika penulisan

BAB II : Tinjauan Umum

Bab ini menjelaskan tentang tinjauan Pustaka dan landasan teoritikal dari Homeless Shelter dengan Fasilitas Latihan Terpadu Secara Umum.

BAB III : Tinjauan Wilayah

Bab ini mendeskripsikan tentang wilayah Kota Jakarta Barat sebagai tempat pemilihan lokasi site untuk rancangan Homeless Shelter.

BAB IV : Metode dan Analisis

Bab ini berisi tentang metode dan analisis penekanan desain Homeless Shelter dengan Fasilitas Latihan Terpadu dengan pendekatan Living in Flexible Space

BAB V : Konsep Perencanaan dan Perancangan

. Bab ini berisi tentang konsep dari sebuah rancangan Homeless Shelter dengan Fasilitas Latihan Terpadu dengan pendekatan Living in Flexible Space.